

Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

Irmayanti Elake¹, Abdul Kadir Ali², Iriyani Abd. Kadir³

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nuku^{1,2,3}

Irmayantielake01@gmail.com¹, abdkadirali@gmail.com², iriyaniabdkadir@gmail.com³,

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Manajemen
Pemilihan Kepala Desa
Konflik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis konflik, strategi penanganan konflik, dan hambatan dalam penyelesaian konflik di Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, pasca pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (penjelasan fenomena alamiah) dengan menggunakan lima (5) informan yang dipilih atas dasar bahwa mereka terlibat langsung dan memiliki pengetahuan tentang isu-isu yang diteliti, yaitu Kepala Desa Aketobatu, Kepala Dusun, mantan anggota panitia pemungutan suara, tokoh masyarakat, dan staf Pemerintah Desa Aketobatu. Informasi dikumpulkan dengan bantuan instrumen seperti observasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada enam kategori konflik yang berbeda: konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik antara kelompok dan individu, dan konflik antar organisasi. Lebih lanjut, dalam hal manajemen konflik setelah pemilihan kepala desa, (a) Dominasi menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam penyelesaian konflik merupakan bentuk represi dengan memandatkan pengurangan konflik yang timbul. b) Tujuan penyatuan integratif dari perspektif pihak-pihak yang berseberangan adalah untuk mengurangi konflik. c) Kompromi berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik karena memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk mengurangi tuntutan dan faktor penentu konflik: Konflik vertikal yang muncul akibat rusaknya komunikasi antara birokrasi dan masyarakat berfungsi sebagai penilaian atas suatu peraturan yang perlu disempurnakan agar masyarakat dapat memahami pedoman pemilihan

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:

Irmayanti Elake
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Nuku
Alamat Jalan Sultan Mansyur, Kota Tidore Kepulauan, Indonesia
Email: Irmayantielake01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jelas bahwa perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada, termasuk perbedaan pendapat. Dinamika sosial yang terus menerus terjadi juga mencakup perbedaan, yang merupakan konsekuensi logis dari keberagaman keseharian masyarakat. Bahkan pada tataran ini, perbedaan masih dianggap wajar. Namun demikian, ketidakwajaran terjadi ketika perbedaan meningkat menjadi perselisihan. Setiap individu pada dasarnya rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, konflik selalu muncul, mencakup lingkup kecil dan besar, termasuk teman bermain, keluarga, lingkungan, organisasi, dan lembaga, serta yang lebih luas, termasuk masyarakat, negara, komunitas, dan hubungan internasional. (George, 2016).

Lebih lanjut, diungkapkan (Ahmad, 2016) bahwa konflik dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari perilaku yang disengaja yang dimaksudkan untuk memaksakan keinginan agresor pada kolektif lain. Hal ini menyiratkan bahwa konflik sering kali digunakan sebagai sarana untuk memperebutkan aset-aset yang berharga, termasuk namun tidak terbatas pada perebutan kekuasaan, perebutan emas atau permata, dan perselisihan teritorial. Perebutan kekuasaan adalah ketrampilan saat ini atau di masa mendatang yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain sesuai dengan harapan atau keinginan seseorang, serta untuk mempengaruhi pikiran atau perilaku seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran atau perilaku orang lain. Kontribusi desa terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, desa harus dilengkapi dengan perangkat yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 202 UU No. 6/2014 tentang Desa, kepala desa (Kades) dan aparatnya merupakan elemen penyelenggara pemerintah desa. Kades, sekretaris desa, serta aparatnya merupakan elemen pemerintah. Satu desa yang dipegang oleh seorang kades yang ditentukan secara demokratis dengan pemilihan kades.

Pemilihan kades merupakan bentuk politik transparan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pemilihan kepala desa, baik penduduk maupun masyarakat dapat terlibat secara aktif. Masyarakat terlibat dalam bentuk partisipasi terkait Pilkades dengan cara melakukan pemungutan suara untuk memilih secara langsung calon kepala desa yang dianggap mampu, akuntabel, dan mampu mendorong kemajuan desa. Pemilihan Kepala Desa, yang biasa disebut dengan PILKADES, berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat pemerintahan. Masyarakat secara tidak langsung berkontribusi pada kemenangan Pilkades dan muncul sebagai entitas utama dalam demokrasi terpimpin. Konsekuensinya, setiap pemilihan disertai dengan konflik. Adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan umum pasti menghasilkan pihak yang tidak berhasil dan yang berhasil, yang pasti akan menghasilkan ketidakpuasan para pihak (Sangadji & Rachman, 2021). Salah satu contohnya adalah perselisihan yang terjadi setelah pilkades. Sebagaimana diketahui, pilkades serentak yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota telah menimbulkan sebab dan akibat.

Berdasarkan temuan penulis yang berasal dari wawancara dengan sejumlah tokoh warga, didapatkan bahwa pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, terjadi konflik sosial antara dua calon kepala desa. Konflik ini dipicu oleh kesepakatan politik suara yang didalangi oleh salah satu pasangan calon kepala desa. Kesepakatan ini berhasil dilaksanakan, karena melibatkan banyak orang yang memberikan hak pilihnya kepada salah satu kandidat. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, terungkap bahwa sekitar lima orang yang telah memberikan hak suara dalam pemilihan tersebut ternyata melanggar ketentuan pemilihan dengan memberikan hak suara tersebut kepada calon kepala desa yang menang, yang memperoleh 230 suara. Perselisihan yang melibatkan 12 suara menyebabkan salah satu calon kepala desa yang gagal meminta pengembalian uang yang telah diberikan dengan kedok pemberian hak pilih namun gagal. Hal ini menimbulkan ketegangan antara dua kubu kelompok masyarakat dan berujung pada masalah berikut: baik tim sukses maupun calon yang kalah tidak siap secara mental untuk menerima hasil pilkades, sehingga konflik setelahnya pun terjadi.

Peneliti termotivasi untuk mengangkat judul mengenai "**Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan**" dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan. Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Sangadji et al. (2022). Metode penelitian kualitatif ini berorientasi pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau situasi yang sedang diteliti. Dalam rangka memperoleh data dari sumber primer maupun sekunder, termasuk wawancara langsung dan dokumen yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Aketobatu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perselisihan yang terjadi di Desa Aketobatu pasca pemilihan kepala desa dalam hal ini adalah Konflik Interpersonal dimana sesuai dengan jenis perselisihan yang ada di desa tersebut bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya benturan kepentingan atau keinginan dari Ketua Panitia pelaksana pemilihan kepala desa Aketobatu sehingga memancing tindakan anarkis massa dengan melakukan gerakan membakar salah satu rumah warga, mencabut hiasan bunga yang ada di halaman rumah serta menurunkan struktur organisasi PKK yang lama dan di Desa Aketobatu konflik yang terjadi antar kelompok dimana sesuai dengan jenis perselisihan yang ada di desa tersebut, yakni perselisihan antara kelompok yang kalah dengan pihak penyelenggara pemilihan kepala desa karena adanya konflik surat suara yang salah coblos sehingga terjadi jenis konflik yang terjadi setelah pemilihan kepala Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah, sehingga beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa adanya kecurangan dalam hal ini ada permainan antara panitia pemungutan suara dengan kepala desa yang menang atas konflik kepentingan atau keinginan dari Ketua panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Aketobatu.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Aketobatu setelah pemilihan kepala desa, tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan anarkis dari para pendukung. Akibat tindakan anarkis yang diperbuat oleh para calon kades Aketobatu pada saat pilkades, pihak panitia langsung mengerahkan aparat keamanan di Desa Aketobatu. Disposisi yang diambil adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum (polisi) dalam upaya meredam aksi anarkis tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk segera meredam konflik dan melanjutkan proses pemungutan suara, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif untuk melaksanakan pemilu. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan arahan, tetapi juga melakukan pendekatan sendiri untuk meredam konflik dan melakukan sosialisasi terkait tidak adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan pihak-pihak yang terafiliasi dalam proses pemilihan Kepala Desa Aketobatu. Di sisi lain, pemerintah tidak hanya bersikap pasif, tetapi secara aktif terlibat dalam upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian. Sekelompok tokoh masyarakat dari Desa Aketobatu melakukan kompromi dengan warga untuk mendapatkan dukungan mereka. Kompromi yang dicapai memerlukan penerapan strategi sosialisasi persuasif, yang bertujuan untuk meyakinkan kelompok-kelompok masyarakat bahwa munculnya konflik lebih disebabkan oleh kesalahpahaman dan bukan karena kecurangan pemilu. Lebih lanjut, penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa di Aketobatu dipengaruhi oleh faktor kendala. Secara spesifik, sengketa muncul karena ketua panitia tidak membubuhkan tanda tangan pada rekapitulasi berita acara yang menjadi penyebab sengketa. Karena masalah-masalah tersebut, perselisihan pun terjadi antara pendukung kedua calon, yang berujung pada pertengkaran fisik yang merusak peralatan kantor dan dekorasi kantor desa

4. KESIMPULAN

Mengacu pada temuan yang dipaparkan serta pembahasan selanjutnya, kesimpulan yang diambil yakni. Ada dua kategori konflik yang muncul di Desa Aketobatu setelah pemilihan kepala desa: a). Perselisihan antarpribadi Perselisihan yang muncul di Desa Aketobatu setelah pemilihan kepala desa dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan antarpribadi. Secara spesifik, konflik-konflik tersebut bersumber dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Aketobatu yang memiliki kepentingan atau keinginan yang berbeda. b) Perselisihan Kelompok Perselisihan kelompok juga terjadi di Desa Aketobatu pasca pemilihan kepala desa. Secara spesifik, perselisihan terjadi antara panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dengan kelompok yang kalah, yang bersumber dari perbedaan pendapat mengenai surat suara. Sementara untuk Manajemen Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa Aketobatu terdiri dari: 1) Dominasi (Suppression) Upaya meredam konflik melalui pengerahan aparat keamanan ke lokasi konflik. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan anarkis para pendukung. Dengan demikian, konflik dapat segera dipadamkan dan perhatian dapat dikembalikan pada proses pemungutan suara, sehingga tercipta lingkungan yang aman untuk pemungutan suara. 2) Inkorporatif Sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi konflik, pemerintah melaksanakan kampanye sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tidak adanya kecurangan pemilu yang melibatkan aparat pemerintah dan anggota yang terafiliasi dalam pemilihan kepala desa Aketobatu. Di sisi lain, pemerintah secara aktif terlibat dalam upaya-upaya pembangunan perdamaian dan tidak bersikap pasif.

Upaya Kompromi: Tokoh Masyarakat Desa Aketobatu melakukan pendekatan kompromi untuk melibatkan warga Desa Aketobatu. Kompromi yang dicapai meliputi penerapan strategi sosialisasi persuasif, di mana dikatakan bahwa pertentangan muncul karena kesalahpahaman dan bukan karena kecurangan pemilu; kesalahpahaman ini menyebabkan perselisihan di antara organisasi masyarakat dan ketidakjelasan tanda tangan ketua penyelenggara pilkades Aketobatu pada rekapitulasi berita acara turut menjadi penyebab perselisihan di Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, pada pemilihan kepala desa Aketobatu. Akibatnya, masyarakat melakukan protes terhadap pemerintah dengan melakukan aksi pembakaran satu rumah dan pencabutan bunga hasan di pekarangan rumah yang berada di sekitar struktur organisasi PKK yang lama

REFERENSI

- Ahmad, H. A. 2016. *Resolusi Konflik keagamaan di Aceh Singkil dalam perspektif Budaya Dominan*, *Harmoni*, 2016, 15 (3), 45-59
- Ali Lating, Rahmat Suaib, Bakri La Suhu (2017) *Konflik Sosial Antara Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa*
- Amin R.M & Aldin J (2017) *faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat pada pilkades serentak di desa balam jaya kecamatan tambang kabupaten kampo tahun 2015* (doctoral dissertation, riau university)
- Arifin Syamsu, 2011. *Pluralisme Agama Antara Konflik dan Integrasi Sosial*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Budiman M. E. (2020) *Menejemen Konflik Pemilihan Kepala desa di desa Gattareng Slomekko Kabupaten Bone*
- Colquitt, JA, Lepine, JA, & Wesson, MJ (2015). *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kinerja dan Komitmen* (hal. 632). New York: Pendidikan McGraw Hill.
- Derr (1975), *Gaya Manajemen Konflik Kolaborasi*. *Repositoy, Unisba.Ac.Id.*
- Fathir Al-Akbar (2022) *Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala desa tahun 2019 di Desa Gantor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*
- Fitratullah, M. H. (2014). *Implementasi Manajemen Konflik Dalam Menemukan Solusi Perbedaan Pendapat: Belajar Dari Kisah Nabi Musa Dan Khidir Dalam surat Al Kahfi Ayat 60-82* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Glenda Nasywa Utami (2021) *Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci*
- Ismail S.K.B.& Ahmad, R. A. B (2017). *Analisis Konflik Pro-life dan Pro-choise isu pengangguran terapeutik dari aspek menjaga nyawa menurut al-quran*. *Jurnal islam dan masyarakat kontemporer*, 14(1), 68
- Joyce L, Hocker & William W. Wilmot. 1978, *Konflik Antar Pribadi. Ke-2*.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sangadji, S. S., & Rachman, S. (2021). An Analysis of The Planning of The Direct Regional Election in The New Normal Period. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 114-123.
- Sangadji, Suwandi S., Febriyani E. Supriatin, Iin Marlina, Afkar, Andi Paerah, and Firdaus Y. Dharta. 2022. "Metodologi Penelitian." OSF Preprints. July 5. osf.io/ywemh.
- Siswanto, (2011). *Manajemen Konflik*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono D (2013). "Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&P"
- _____ (2014) "Pengembangan bahan ajar menyimak berbasis multimedia interaktif dalam model belajar mandiri untuk sekolah menengah pertama. *Seloka: Jurnal bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2)
- Thomas, Kw Dan R. H. Kilman (1974), *Thomas Dan Kilman Conflict Model Intrumen*. Sterling Forest, Ny; Xicom Inc
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.
- Wirawan, (2009) *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Wirawan (2009) *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta, Salemba Humanika, 2009
- Wirawan. (2010). *Konflik dan manajemen konflik; Teori, Aolikasi dan penelitian*. Salemba empat Jakarta